HADIRI PENCANANGANAN ZI SKIPM KUPANG, OMBUDSMAN NTT TEGASKAN PENINGKATAN PELAYANAN

Kamis, 25 Agustus 2022 - Veronica Rofiana Edon

KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton hadir dan menjadi saksi pencanangan Zona Integritas (ZI) di lingkup Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang, Selasa (23/8/2022). Turut hadir dan menjadi saksi dalam kegiatan di Hotel Kristal Kupang tersebut Walikota Kupang, George Hardjoh dan Sekretaris Badan Karantina Ikan Pusat, unsur Forkompimda Provinsi, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang serta para pengguna jasa stasiun karantina Kupang.

"Saya selalu berharap agar penandatanganan pencanangan Zona Integritas ini tidak sekedar seremonial belaka, tetapi harus ada perbaikan nyata pada loket-loket pelayanan seluruh satuan kerja, utamanya satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik," tegas Darius saat menyampaikan sambutan.

Darius juga menyampaikan bahwa nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat memperbaiki harus merasuk dalam sanubari aparatur negara agar hak-hak masyarakat untuk dilayani dengan baik dapat terpenuhi. Serta mampu memastikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktik percaloan, bebas pungli, responsif, adanya prosedur pelayanan yang jelas, biaya yang transparan, serta kepastian waktu pelayanan.

"Semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan Zona Integritas tersebut, akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat kita. Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif. Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif belaka," lanjutnya

Menutup, Darius menyampaikan terima kasih kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang dan jajaran atas komitmen kuat pembangunan Zona Integritas di wilayah kerjanya, dan berharap hal ini bisa mendorong perbaikan kualitas layanan publik ke depan.